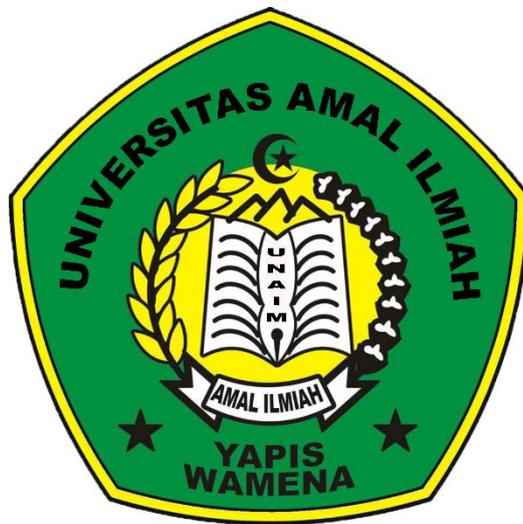


**TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA
DISTRIK JIGINUA KABUPATEN LANNY JAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan*



Oleh :

IDEFRI KOGOYA
NIM. 2014 10 136

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA DISTRIK JIGINUA KABUPATEN LANNY JAYA

Identitas oleh,

NAMA : IDEFRI KOGOYA
NIM : 201410136
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP. 19700408 199702 1 002

TUKIJAN, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1427016601

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

SITI KHIKMATUL RISQI, S.IP., M.Si.
NIDN. 1201037702

HALAMAN PENGESAHAN

**TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA
DISTRIK JIGINUA KABUPATEN LANNY JAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Desember 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP. 197004081997021002

TUKIJAN, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1427016601

Anggota,

Anggota,

H.AGUS SUMARYADI, S.Pt.,M.Si
NIDN. 1212116701

H.MUHAMMAD ALI, S.Sos,M.Si
NIDN. 1417056701

Mengetahui
Rektor
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP. 197004081997021002

ABSTRAKSI

Idefri Kogoya, NIM. 201410136 *“Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya (Studi Kasus di Kampung Tepogi)”*. Dibimbing oleh Rudihartono Ismail selaku Pembimbing I, dan Tukijan selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai “Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya (Studi Kasus di Kampung Tepogi). Adapun indikator kinerja pegawai : partisipasi, Daya Tanggap, Pengawasan, Efisiensi, Transparansi. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampel jenuh. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 39 pegawai. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan studi pustaka .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan rata-rata skor 111 dengan predikat baik. Dimana Indikator. Partisipasi dimana analisis tanggapan responden mengenai partisipasi menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik, Daya Tanggap analisis tanggapan responden mengenai Transparansi menunjukkan rata-rata skor 111 dengan predikat Baik. Pengawasan analisis tanggapan responden mengenai Daya Tanggap menunjukkan rata-rata skor 115 dengan predikat Baik, Efisien analisis tanggapan responden mengenai Efisien menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik, Transparansi analisis tanggapan responden mengenai Transparansi menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik.

Kata kunci: Tata Kelola, Penyelenggaraan, Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolonganNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Ibu **Siti Khikmatul Risqi.,S.IP.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak **Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Pembimbing I dan Bapak **Tukijan, S.Sos** selaku Pembimbing II yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta Kepala Distrik Jiginua Jonas Kogoya, S.Pd yang telah memberikan ijin, rekomendasi bantuan kepada penulis serta seluruh pegawai Distrik Jiginua.
5. Orangtuaku tercinta, **Mupis Kogoya** dan Ibunda. **Delina Jigibalom** yang telah membesarkan penulis serta saudaraku, **Leko Kogoya** beserta Istriku **Yumite Penggu** yang telah memberikan doa dan restu, bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

7. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga semua amal bakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat dihati pembaca.

Wamena,2020

P e n u l i s,

IDEFRI KOGOYA
NIM. 201410136

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. Landasan Teori	9
A. Kajian teori	9
2.1. Tata Kelola Pemerintahan.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	17
C. Definisi Operasional.....	19
D. Kerangka Konseptual	20
BAB III.METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	21
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	21
1. Lokasi Penelitian	21
2. Waktu Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Populasi dan Sampel	22
D. Instrumen Penelitian	22

E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi	22
2. Wawancara.....	22
3. Dokumentasi.....	22
F. Teknik Analisa Data	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	36
1. Keadaan Lokasi Penelitian.....	36
2. Keadaan Responden.....	52
3. Analisa Data	55
BAB. V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1	Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin.....	53
Tabel 4.2	Keadaan responden umur	53
Tabel 4.3	Keadaan responden berdasarkan tingkat Pendidikan...	54
Tabel 4.26	Rata-rata skor indikator partisipasi.....	66
Tabel 4.27	Rata-rata skor dari indikator daya tanggap.....	67
Tabel 4.28	Rata-rata skor dari indikator pengawasan.....	68
Tabel 4.28	Rata-rata skor dari indikator efisien.....	69
Tabel 4.28	Rata-rata skor dari indikator transparansi.....	70
Tabel 4.29	rata-rata skor variabel tata kelola penyelenggaraan pemerintah.....	70

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar	2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	27
Gambar	4.1 Struktur Organisasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik dipusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diembankan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas ekonomi daerah/nasional, tingginya jumlah masyarakat urban yang menuju kota untuk mengadu nasib, pada akhirnya telah menyebabkan berbagai gejolak sosial. Hal ini tidak lain disebabkan karena tingginya konsentrasi massa pencari kerja di kota yang tidak berjalan seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Berkaca pada persoalan ini, pemerintah kemudian berinisiatif mengurangi konsentrasi massa pencari kerja di satu titik tertentu dengan jalan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah (desa). Dasar pertimbangannya adalah jika ekonomi desa semakin maju maka tentunya masyarakat tidak akan berbondong-bondong meninggalkan desa untuk mengadu nasib ke kota.

Sepintas, niat tersebut terasa sangat mulia karena adanya keinginan pemerintah mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. Aplikasinya kemudian dilaksanakan dengan memberikan otonomi kepada desa yang disertai dengan sejumlah anggaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, apabila dicermati lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya tuntutan dan harapan yang diberikan kepada pemerintah desa sangat tidak masuk di akal dan tidak terukur.

Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi desa sejatinya sungguh sangat kompleks. Desa di negeri ini umumnya sangat dekat dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum. Jika

desa dipaksakan untuk menjadi pionir sekaligus pelaku perubahan ekonomi, maka tentunya hal ini tidak akan memberikan manfaat optimal dalam mendorong perekonomian daerah. Pada titik ini, hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian tanggung jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintah desa tidak pernah di tingkatkan.

Pada titik ini, peranan kepala desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal. Didalam mewujudkan sistim pemerintahan desa yang baik pemerintah

desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam adminstrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. Jika desa tidak dikelola dengan baik maka tentu terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu peranan kepala desa, kepala distrik dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistim pemerintahan desa yang baik dan benar.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan

sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana-prasarana, dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya merupakan instansi pemerintah daerah yang menangani urusan otonomi desa di kampung tepogi dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri seluas-luasnya demi percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang diantaranya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, percepatan pembangunan, pengawasan, tertib administrasi pemerintahan desa, memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, keamanan dan ketertiban dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, (Sesuai Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tahun 2013 Tentang Pemerintahan desa). Dari tugas tersebut maka pemerintah desa diharapkan mampu bekerja optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu, peranan kepala desa/kepala distrik, aarat kampung dan partisipasi masyarakat dapat bersinergi untuk mendukung tercapinya penyelenggaraan pemerintahan desa secara maksimal.

Persoalan yang terjadi pada distrik jiginua saat ini adalah dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diwujudkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) serta pengelolaan dana bantuan lain yang mengalir ke desa seperti dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari dana alokasi khusus dalam rangka percepatan

pembangunan desa. Dalam prakteknya, pengelolaan sejumlah besar anggaran yang mengalir ke desa, dirasakan sangat tidak optimal yang tidak dapat ditunjukkan dengan data-data statistik seperti peningkatan ekonomi rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seperti pembangunan proyek air bersih, kualitas jalan yang tidak memenuhi standar pembangunan, dan pembangunan fasilitas umum seperti Puskesmas yang tidak berkualitas.

Kenyataan ini, pada akhirnya memberikan pandangan miring kepada pemerintah kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya selaku operator penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa. karena dalam pengalokasian dana tersebut di rasakan tidak tepat sasaran seperti jenis kebutuhan masyarakat tidak sama dengan bentuk pembangunan yang di kerjakan, serta berbagai sumber dana yang di terima desa, tidak memberikan hasil pembangunan pada distrik jiginua. Pada titik ini, timbul pertanyaan dari berbagai pihak terkait manajemen pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persoalan yang dihadapi desa sesungguhnya tidak hanya terletak pada besaran dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan pembangunan, namun yang paling krusial dibutuhkan adalah bagaimana memutus mata rantai ketidak berdayaan dan tidak inovatifnya pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan pada kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi pada kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya saat ini, yang merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung dan menghambat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa seperti, rendahnya kemampuan aparat desa dalam menjalankan dan mengelola sistim pemerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan desa yang belum maksimal, pengalokasian dana dan penentuan target pembangunan yang tidak tepat sasaran,

pekerjaan proyek-proyek yang ada dalam desa dan yang di kelola langsung oleh pemerintah distrik jiginua kabupaten lanny jaya yang tidak tepat sasaran, kualitas pekerjaan sarana atau infastruktur yang ada dalam desa yang tidak mengutamakan kualitas pekerjaan tetapi hanya ingin menghabiskan dana dari pada kualitas pembangunan dan jenis pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Serta rendahnya pengawasan pemerintah daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun pengawasan anggaran dalam menentukan sasaran pembangunan yang ada pada kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya dalam mewujudkan percepatan pembangunan.

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya di atas merupakan persoalan serius yang harus di tanggapi oleh semua komponen pemerintahan baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat desa pada umumnya dalam membenahi masalah yang terjadi karena dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan desa, dan seharusnya desa di jadikan prioritas utama dalam membenahi semua sistim yang ada dalam pemerintahan desa, karena masalah tersebut di atas dapat berpotensi besar terhambatnya pembangunan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan dan kesejateraan masyarakat.

Bertitik tolak dari berbagai persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan kampung tepogi distrik jiginua kabupaten lanny jaya dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.*

B. Batasan Masalah

Untuk mengetahui Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan, peneliti menggunakan indikator meliputi: partisipasi, Daya Tanggap, Pengawasan, Efisiensi, Transparansi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimanakah Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara Akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang tata kelola penyelenggara pemerintahan selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan serta merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S-1).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan seperti kepala distrik jiginua kampung tepogi dan terutama untuk mengetahui Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

2.1 Manajemen Tata Kelola Pemerintahan

Suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan meliputi tiga pihak, yaitu: negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state civil society-market. Sementara sektor yang menjadi subyek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti : penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara. Subyek yang diatur di dalam tata pemerintahan juga meliputi: proses, mekanisme dan kelembagaan, dimana warga dan kelompok masyarakat mengatur kepentingan mereka dan mengatasi perbedaan diantara mereka. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan; dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative. Di dalam mengatur kewenangan dari kekuasaan, disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Di dalam berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan tata pemerintahan disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut

- a) Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah [khususnya, berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan.
- b) Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar konsensus.
- c) Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan.

- d) Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya;
- e) Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil;
- f) Supremasi hukum diletakkan dan dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan ciri-ciri penting tata pemerintahan seperti diatas ada beberapa unsur atau prinsip utama di dalam suatu tata pemerintahan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Partisipatif; membangun consensus;
- b. Responsive;
- c. transparan; efektif dan efisien;
- d. membangun kesetaraan;
- e. bertanggungjawab;
- f. mempunyai visi strategis

Gagasan Tata Kelola yang didefinisikan sebagai tata hubungan kekuasaan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Di dalam Tata Kelola itu ada keberpihakan pada kepentingan publik dan kepentingan kalangan yang dimarjinalkan.

Ada 2 prinsip utama di dalam suatu Tata Kelola, yaitu: prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip mekanisme formal meliputi: orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal meliputi : partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas.

Ada 2 hal penting di dalam prinsip mekanisme formal, yaitu: indikator aturan main dan pemberdayaan. Di dalam mewujudkan Tata Kelola kedua indikator itu harus dilakukan secara bersamaan. Perubahan aturan main agar berpihak dan mengakomodasi kepentingan publik dan kelompok marjinal harus disertai dengan pemberdayaan dari daulat rakyat dan kalangan marjinal.

Ada 10 prinsip dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan yaitu sebagai berikut

- 1) Partisipasi Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik, secara langsung maupun tidak langsung
- 2) Penegakan Hukum Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- 3) Transparansi Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
- 4) Kesetaraan Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
- 5) Daya tanggap Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- 6) Wawasan kedepan Membangun pemerintah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dalam mengikutsertakan warga didalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya
- 7) Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
- 8) Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luasEfisiensi dan efektivitas Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab
- 9) Profesionalisme Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

- 1) Unsur-unsur pendukung akuntabilitas meliputi:
Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
- 2) Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
- 4) Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan .
- 5) Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait.
- 6) Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral
- 7) Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset negara, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan barang persediaan, maupun pengelolaan barang bantuan.
- 8) Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana. Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu

pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan.

Tiga faktor utama yang dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya transparansi dan partisipasi di atas adalah:

- 1) Ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini;
- 2) Kemudahan mengakses data/informasi; serta
- 3) Keseragaman data/informasi yang disampaikan.

Informasi dan kegiatan yang harus transparan dalam hal pengelolaan dana yang meliputi sistem, jumlah dan sumber dana, serta penyalurannya; organisasi dan personal meliputi struktur, tugas, personal, dan sistem manajemennya; perencanaan meliputi rencana jangka pendek dan menengah; pelaksanaan meliputi progress report serta kendala yang dihadapi; pengadaan barang dan jasa meliputi informasi terpadu pelaksanaannya; dan penyaluran dana meliputi jumlah dan nilai dana yang tersedia, kriteria dan jumlah penerima, sumber dan bentuk dana, serta mekanisme pertanggung jawaban dan audit penggunaan dana. Penerapan Prinsip Penegakan Hukum dengan mengutamakan prinsip kehati hatian, transparan dan berkeadilan, untuk mencegah adanya tindakan korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan, dengan tindakan perbaikan, tindakan

administratif dan/atau sanksi pidana. Untuk menjamin diterapkannya prinsip di atas, tindak lanjut atas rekomendasi legal / hukum hasil pengawasan/audit harus dilakukan secara transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Pelaporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) Tata Kelola Pemerintahan yang berkelanjutan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:
Konsisten dan menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan auditable.
- 2) Obyektif, komprehensif, informatif dan akurat.
- 3) Didukung dengan bukti-bukti yang cukup, relevan, kompeten (berkesesuaian) dan materil.
- 4) Menunjukkan tingkat pencapaian kinerja atau tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, termasuk tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Pengaturan hubungan antar lembaga agar proses pelaksanaannya tetap dapat terkoordinasi secara baik sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing lembaga/instansi terkait. Beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan harus dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait.
- 2) Kegiatan dekonsentrasi oleh departemen dan kementerian yang terkait.
- 3) Hubungan antar Pemangku kepentingan yang peduli pada transparansi dan keberlanjutan suatu tata kelola
- 4) Hubungan antar Organisasi masyarakat ataupun Kelompok masyarakat yang terlibat dalam suatu proses tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat misalnya dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam berbagai keputusan publik.

Supremasi hukum akan mengacu kepada proses penegakan hukum yang bersifat fair dan adil. Transparansi akan banyak mengacu tata kelola

arus informasi yang transparan dan akses publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Responsif sendiri lebih cenderung untuk mengacu kepada institusi dan proses yang mencoba untuk melayani semua kebutuhan stakeholder yang terkait dengan sikap tanggap responsif yang cepat, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Orientasi kepada konsensus berarti adalah pencapaian kesepakatan atas perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi diantara stakeholder. Efektif dan efisien berarti bahwa dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka seharusnya memperhatikan bagaimana mengelola sumberdaya lembaga yang ada agar sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam prinsip efektif dan efisien ini terkandung maksud agar pelaksanaan good governance dalam suatu lembaga, baik itu dalam lembaga pemerintahan dan perusahaan, ataupun dalam kelompok masyarakat sipil dapat berdaya guna secara efektif dan efisien. Sedangkan maksud dari prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas dalam hal ini mempunyai wujud pertanggungjawaban kepada publik atau shareholder dalam konteks perusahaan atas semua apa yang sudah dilakukan. Aspek pengawasan dan partisipasi publik untuk menjaga pelaksanaan kelembagaan yang baik dan benar memang menjadi tumpuan utama dalam prinsip ini.

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, satu elemen mendasar dari pembangunan berkelanjutan adalah sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan dalam konteks ini diartikan 3 tema besar yaitu keberlanjutan secara lingkungan (environmental sustainability), keberlanjutan secara ekonomi (economic sustainability) dan keberlanjutan pembangunan manusia (human development sustainability). Good governance sesungguhnya mempunyai peran yang menonjol dalam pelaksanaan dan menjaga konsistensi pembangunan berkelanjutan. Peran good governance dalam konteks ini adalah sebagai petunjuk yang menjaga dan menautkan 3 elemen pembangunan berkelanjutan tersebut sehingga

secara konsisten dapat dipantau, serta agar tetap dapat mencapai keberlanjutannya dalam 3 elemen tersebut, dimana 3 elemen tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya good governance adalah irisan sinergitas dari 3 elemen keberlanjutan dalam pembangunan berkelanjutan.

Good governance dalam konteks pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai suatu upaya sinergis yang memadukan pembangunan lingkungan, manusia dan ekonomi. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada didalamnya memungkinkan 3 aktor dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil dapat saling menjaga dan berpartisipasi proses yang sedang dilakukan. Good governance kemudian akan berfungsi sebagai elemen yang memadukan 3 aktor tersebut dalam satu wadah dan tujuan yang sama. Tanpa good governance akan sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. Lebih lanjut dalam pandangan keberlanjutan yang ada pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan pembangunan manusia, good governance menempatkan dirinya sebagai irisan sinergis yang mempertemukan 3 tautan keberlanjutan tersebut. Dengan adanya good governance, maka konsisten pencapaian keberlanjutan tersebut dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang telah dikemukakan sebelumnya. Good governance memberikan ruang bagi masing-masing stakeholder untuk saling melengkapi dan mempunyai fungsi kontrol antara satu dan lainnya.

2.2 Manfaat Tata Kelola Pemerintahan

Jika prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan maka akan terlaksana sebuah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Di antara manfaat dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel;

- 3) Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- 5) Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.3 Dimensi Tata Kelola Pemerintahan

Terdapat banyak teori dari berbagai sumber ataupun para ahli mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menurut **Mardiasmo (2004: 18)**, karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik) meliputi sebagai berikut:

1) Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, kedudukan dan peran pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Menurut **Suryono (2001:124)** partisipasi merupakan ikut

sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut **Slamet dalam Suryono (2001:124)** partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut **Simatupang dalam Yuwono, (2001:124)** partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.

Menurut **Isbandi (2007:27)** adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Hetifah dalam Handayani (2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”.

Menurut Histiraludin dalam Handayani (2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam

pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

2) Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.

3) Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Menurut **Coolins (1986:116)** Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*)

Menurut **Wardijasa (2001:14)** Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi di setiap

kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Menurut **Surya Darma (2007:12)** Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya .

Menurut **Muhammad (2007:46)** Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbale balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

4) Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan

disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

5) Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, *talk show*, layanan hotline, dan prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.

6) Wawasan ke Depan

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.

7) Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil

kerja kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

8) Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut **George R. Terry, (2006:395)** Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut **Kertonegoro (1998:163)** Pengawasan adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Menurut **Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150)**, Pengawasan adalah suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Menurut **Terry (dalam Sujamto, 1986:17)**, Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Menurut **Dale (dalam Winardi, 2000:224)** dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

9) Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi dan otonomi daerah kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa.

10) Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan staf yang efektif, sistem pengembangan karir, dan pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian staf yang wajar.

Prinsip-prinsip di atas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian. Yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang

dikehendaki stakeholders. Sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah, kota, maupun kabupaten di Indonesia.

Kunci utama memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka aturan hukum senantiasa dipandang sebagai pemberi arah bagi setiap proses pembaharuan. Karena perspektif [reformasi](#) harus berjalan secara gradual, konseptual, dan konstitusional.

2.4 Peraturan pemerintah tentang tata kelola pemerintahan

tata kelola pemerintahan yang baik dalam perundang-undangan Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (Undang-Undang Pasal 03 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meliputi

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan; keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggara Negara
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Pilar-pilar Tata Kelola Pemerintahan

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang menyinergikan pencapaian tujuan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah sebagai *good public governance*, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *good corporate governance*. Tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik pertama adalah, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh pihak lain dapat dipakai dalam pengkajian yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggara pemerintahan antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Yuliana dwi ambarwati 2013	Tata kelola penyelenggara pemerintahan Desa menurut PP no 72 tahun 2005 studi kasus di desa tarubasan kabupaten karanganyar kabupaten klaten	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam tata kelola penyelenggara pemerintah desa, desa tarubasan berpedoman dengan peraturan pemerintahan republic Indonesia no 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam tata penyelenggara pemerintahan juga banyak mendapati kendala salah satunya adalah kendala dalam membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di bidang pembangunan bantuan social dan pemerintah dan dalam bidang pertanian tentang irigasi.	jurnal Vol.1, No.1 (2013)
2	Suhardi ,2016	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi.	jurnal Vol 4, No 3 (2016)

			<p>Penerapan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tersebut salah satu peningkatan yang berubah Di desa Majannang terjadi keserasian laju pembangunan di Desa Majannang dalam hal ini membawa dampak positif terhadap perkembangan di desa majannang dan sumber daya manusia yang Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial serta keterlibatan lembaga sangat ikut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan efektif.</p>	
3.	<p>Rudy Suryanto, Sigit Arie Wibowo, Harjanti Widiastuti</p>	<p>praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari desa percontohan</p>	<p>Dari hasil studi ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat dibagi menjadi tiga sub utama, yakni meliputi: (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah pelaporan keuangan dan kinerja, dan (3) masalah pencapaian kinerja desa. Dalam rangka menyikapi permasalahan yang terjadi, Pemdes Dlingo melakukan sinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan fihak universitas, serta melakukan pendekatan persuasive untuk merubah</p>	<p>Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 1 Hal 1-16</p>

			pola pikir masyarakat agar lebih mandiri	
--	--	--	--	--

C. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan makna dan maksud dari variabel serta indikator penelitian. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi operasional penelitian ini adalah Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai tata hubungan kekuasaan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya Di dalam Tata Kelola itu ada keberpihakan pada kepentingan publik. Adapun indikator yang digunakan yaitu :

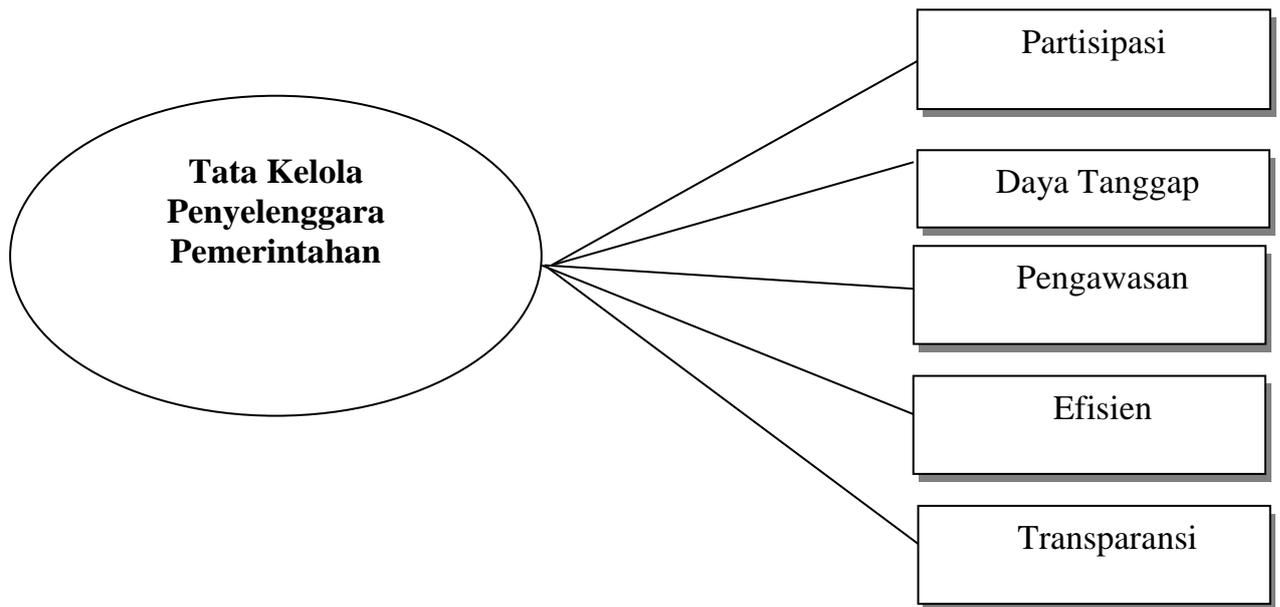
- 1) Partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.
- 2) Daya Tanggap merupakan meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- 3) Pengawasan merupakan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat
- 4) Efisiensi merupakan Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 5) Transparansi proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian



Dalam kerangka konseptual penelitian diatas terlihat bahwa pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan dengan indikator 1. partisipasi, 2. Daya Tanggap, 3. Pengawasan, 4. Efisiensi, 5. Transparansi

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang direncanakan dalam penelitian ini ± 2 bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, menurut **Sugiyono (2011:11)** penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut **Rohman dalam Sugiyono (2011:14)**, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Aparat Kampung pada Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya yang berjumlah 39 orang.

b. Sampel

Menurut **Arikunto (1989 : 87)** bahwa sampel yang berjumlah kurang dari 100 orang penarikan sampel adalah sampel jenuh, jadi dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah “sampling jenuh” yaitu suatu teknik penarikan sampel dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel,. Peneliti menggunakan metode sampling jenuh karena jumlah populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel

dalam penelitian ini adalah 39 responden yang merupakan jumlah populasi.

D. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Skala penilaian untuk butir pertanyaan disusun berdasarkan Skala *Likert* yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat Baik skor : 4
- b. Baik skor : 3
- c. Tidak Baik skor : 2
- d. Sangat Tidak Baik skor : 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono (2009:90)** teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner (*Questionnaire*) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi dengan maksud mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pengamatan (*Observation*) secara langsung pada obyek penelitian untuk memahami situasi dan kondisi yang berkembang guna meningkatkan kesiapan lainnya dalam melaksanakan kajian.
3. Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu mempelajari dan menganalisa buku atau bahan tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut **Hasan (2006:24)**, analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Teknik analisa data deskriptif dapat menggunakan

skor (skala ordinal), persentase (skala nominal), nilai rata-rata (mean), data yang sering muncul (modus), nilai tengah data (median) dan analisa data deskriptif lain yang memiliki sumber (referensi) yang dapat dipercaya secara ilmiah.

Tabel penolong untuk menentukan predikat dari kategori untuk sampel 39 responden :

Jumlah skor ideal (skor maksimum) : $4 \times 39 : 156$

Jumlah skor terendah (skor minimum) : $1 \times 39 : 39$

Tabel Interpretasi Nilai Skor

No	Interval jumlah skor	Predikat
1	$117 < s/d \leq 156$	Sangat baik
2	$78 < s/d \leq 117$	Baik
3	$39 < s/d \leq 78$	Tidak baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Keadaan Lokasi Penelitian

Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Jiginuaneri, Distrik Balingga, Distrik Kuyawage dan Distrik Poga. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2.248 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang Transparansi dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.

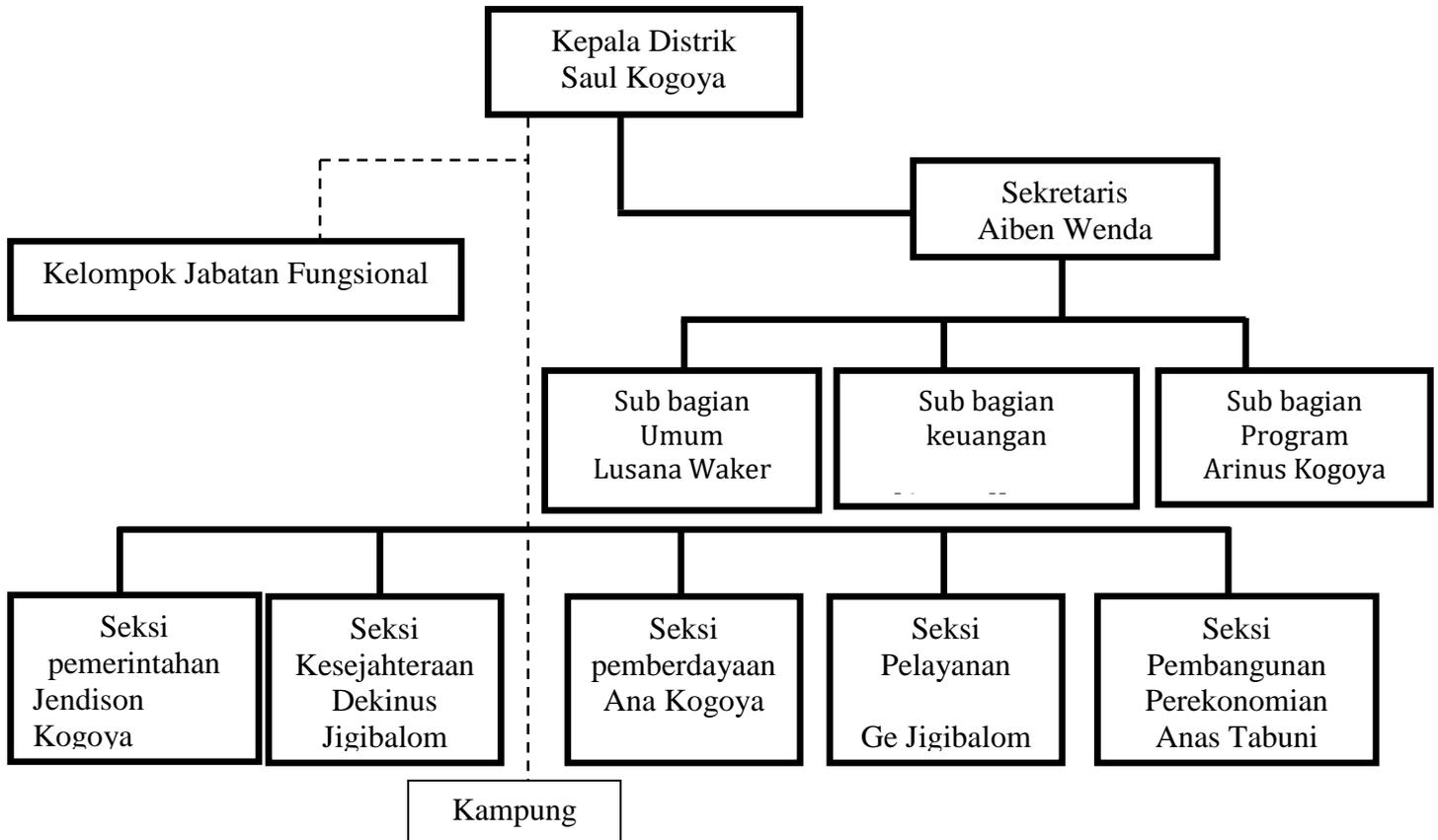
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lanny Jaya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Distrik Jiginua adalah sebuah Distrik di kab. Lanny jaya. Provinsi Papua, Indonesia. distrik ini dibentuk pada tanggal 12 Agustus 2014.

1. Struktur Organisasi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya

Gambaran 4.1

Susunan Organisasi Distrik Jiginua.



Sumber :Data Kantor Distrik Jiginua 2020

2. Visi dan Misi Distrik Jiginua

Adapun Visi dan Misi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujud ketersediaan sarana dan perasarana infrastuktur Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya yang memandai dan berkualitas.

b. Misi

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur pemukiman Distrik Jiginua di bidang pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten lanny jaya
2. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat.
3. Menata daerah Kabupaten Lanny dengan nyaman dan berkualitas.

3. Uraian Tugas

Susunan Organisasi Penelitian Pemerintah Distrik Jiginua Susunan Organisasi Pemerintah Distrik terdiri dari:

1. Kepala Distrik
2. Sekretaris
3. Seksi-seksi tersendiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi ketentraman.
 - c. seksi pemberdayaan masyarakat
 - d. seksi pelayanan
 - e. Seksi pembangunan dan perkonomian dan.
 - f. Kelompok jatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas kepala distrik, sekretaris, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional merupakan prinsip kordinasi, integrasi singronisasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Distrik bertanggung jawab memimpin dan menkoordinasikan bahwa serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam tugas serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

4. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

a. Kedudukan, Tugas Pokok.

- a. Distrik mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh bupati berdasarkan ketentuan peraturan –peraturan perundang undangan.
- b. Selain tugas pokok dan fungsi, kepada distrik menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 2. Mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 3. Menkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 4. Menkoordinasikan pemeliharaan perasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 5. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di tingkat distrik.
 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kampung dan Distrik
 7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketata usahaan dan rumah tangga Distrik
- c. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, daerah yang meliputi aspek perizinan, koordinasi rekomendasi, pembinaan Transparansi, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan
- d. Pelimpahkan urusan pemerintah sebagai mana dapat disebut dalam ayat (1) satu pasal ini ditetapkan dengan keputusan bupati
- e. Pelimpahkan urusan pemerintahan sebagaimana disebut dalam ayat (3) pasal Dapat dilimpahkan kepada distrik setelah mendapatkan pertimbangan dari bupati.

Uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan Distrik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Distrik

Distrik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagai mana di maksud dalam pasal (3) Distrik mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. pengkoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ktertiban umum
3. pengkoordinasian pemeliharaan perasarana dan fasilitas umum;
4. Pengkoordinasian penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Distrik
5. Pembinaan penyelenggraan pemerintahan kampung dan atau kelurahan;
6. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tuganya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung /keseluruhan
7. Penyusunan program dan langkah- langkah kegiatan pembinaan administrasi dan ketata usahaan;
8. Pelaksanaan tugas lain di berikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris Distrik

Sekretariat adalah unsur staf mempunyai tugas melaksanakan pembinaan adnistrasi dan memberikan pelayanan tenis adnistrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan Distrik.

Untuk meyelenggrakan tugas sebagai mana dimaksuk dalam pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan,mengelolah data dan formasi menginventarisasi permasalahan seta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesekretariatan.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengedalikan, mengevaluasi dan meloporkan kegiatan secretariat.

3. Menyiapkan, bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan Distrik
4. Memberikan pelayanan naska, kearsipan, pengetikan/ pengadaan/ pendistribusian.
5. Melaksanakan penerimaan tamu, kehumasan protokoler.
6. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja rapat/ pertemuan, tepon dan sasaran atau perasarana kantor.
7. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kedaraan dinas dan pelayanan kerumah tangga lainnya.
8. Mempunyai bahan kordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan perumusan rancangan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rusan kesekretariatan.
9. Menyiapkan bahan kordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan perumusan system dan prosedur tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana.
10. Melaksanakan penyediaan inventarisasi, kebutuhan, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja
11. Memfasilitasi usulan pengadaan atau mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan pemberian sanksi/ hukum, tatusaha pelatihan pegawai.
12. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan anggaran, verifikasi, perbendarahan penghintungan gaji Transparansi lembur, insentif, kesejahteraan pegawai.
13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ke Distrik.
14. Melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapata kelas daerah.
15. Melaksanakan system jaringan dokumentasi dan informasi
16. Pemproses legislasi surat sesuai dengan kewenangannya

17. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan ke Distrik
18. Melaksanakan analisis dan pengembangan kerja sekretariat dan Distrik
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan kepala Distrik.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, Kampung dan atau keluarahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Pembinaan dan pengkoordinasikan kegiatan pemerintahan umum dalam wilayahnya.
- b) Pembinaan administrasi dan perangkat pemerintahan Distrik atau kampung.
- c) Fasilitasi pemberian hak-hak tanah.
- d) Fasilitasi penetapan lokasi untuk pembangunan
- e) Penanganan masalah-masalah pertahanan di wilayahnya, dan
- f) Pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh kepala Distrik
- g) Mengumpulkan, mengelolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan
- h) Merencanakan, melaksanakan, mengedalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan seksi.
- i) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintah
- j) Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

- k) Meyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintahan, kelurahan, meliputi:
1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan perakat kelurahan
 2. Menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan perselitan-perselitia antara desa atau kelurahan suatu wilayah kecamatan
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka musawarah kelurahan
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan pemekaran peningkatan penyatuan atau pengapusan kelurahan
 5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 6. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antara desa atau keluraan
 7. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah
 8. Menyipakan bahan pegusulan pajak bumi dan bangunan
 9. Menyiapka bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penikatan-peningkatan dan pendapat asli daerah dari pajak bumi dan bangunan
 10. Melaksanakan urusan administrasi kependudukan
 11. Penertipan kartu keluarga
 12. Penertinban kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan kartu identitas Anak
 13. Penertiban surat keterangan permohonan akte cacatan sipil
 14. Administrasi mutasi penduduk
 15. Pengelolaan data penduduk
 16. Menerima dan mempelajari laporan kependudukan dari kelurahan menyayikan data kependudukan
 17. Menyusun dan melaporkan data kependudukan
 18. Menyusun dan melaporkan data monografi
 19. Mengelolah, menganalisa dan memiliharah data kependudkan dalam data base SIMDUK.

20. Memfasilitasi memperlancar dan atau menkoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan transmigrasi, urbanisasi, emigrasi atau imigrasi.

21. Melaksanakan tugas tentang keagrariaan di kecamatan meliputi:

- a) Membantu dalam hal pendapatan tanah
- b) Pemeliharaan data pertanaan
- c) Memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah surat –surat mengenai peralihan hak atas tanah, keterangan kewarisan, keterangan pinjaman dimana tanah sebagai jaminan
Memproses degalitasi administrasi pertanahan meliputi:
 1. Surat keterangan waris
 2. Surat kuasa waris
 3. Pertimbangan permohonan ukur tanah
 4. Surat peklaan
 5. Surat persetujuan pembagian hak bersama
 6. Melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja seksi
 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh kepala Distrik.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan polisi pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 17, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas:

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat,
- b. Transparansi dan penegakan daerah,
- c. Transparansi terhadap tanah-tanah asset pemerintah Daerah dan penegakan hukum di tingkat Distrik,
- d. Pelaksanaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Distrik.

- f. Mengumpulkan, mengolah data dari informasi, menginventarisasi permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan
- g. Ketertiban umum.
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengedalikan, mengevaluasi dan melaporkan

Kegiatan seksi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis dan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit berkaitan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Melaksanakan Transparansi perzinahan yang menjadi kewenangan Distrik
- d. Melaksanakan pengurusan, surat keterangan cacatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor.
- f. Mempersiapkan serta menyusun potensi hansi atau linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana.
- g. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang dengan:
 - 1. Pengulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor sosial.
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyangdang masalah sosial lainnya
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusilah
 - 4. Penertiban dan pencegahan terhadap kejadian kebakaran, bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 - 5. Memantau dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala Desa dan peraturan perundang undangan lain

- h. Melaksanakan Transparansi dan tindakan pembinaan (nonyustisia) terhadap ketahanan masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah, keputusan kelapa daerah, dan peraturan perundang – undangan lainnya
- i. Melaksanakan patroli terpadu di kampung-kampung dalam rangka pembinaan dan Transparansi keamanan swakarta
- j. Melaksanakan Transparansi dan memantahu penyelenggraan pertunjukan dan keramaian kampung bekerjasama dengan saksi ketetraman kertertiban kelurahan setempat.
- k. Melakukan usaha kegiatan dalam rangka pengamanan wilayah
- l. Mengikuti dan mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- m. Mendaya guna satuan –satuan hansip atau linmas diwilayah Distrik dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbahagai bentuk ancaman bahaya.
- n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintahan instansi lainnya yang diberikan dengan keamanan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Distrik.
- o. Melaksankan analisis, pengembangan kinerja saksi.
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh kepala Distrik.

5. Seksi Pelayanan Umum

Saksi pelayanan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan sdandar prosedur pelayanan umum, meliputi kbersihan serta sarana dan perasarana umum.untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 21, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Pengadaan sarana kebersihan berupa tempat pembuangan sementara atau bak sampa untuk menampung sampah warga masyarakat setempat.
- b. Transparansi dan pemeliharaan jalan Distrik, kelurahan dan kampung.
- c. Transparansi bangunan yang dilksanakan oleh pemerintah swata maupun masyarakat.

- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan
- e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- f. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemrosesan, memberikan dan mengawasi perijinan yang menjadi kewenangan Distrik.
- g. Memproses, memberikan, mengawasi serta membatalkan ijin sesuai dengan kewenangan.
- h. Melaksanakan penertiban surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian.
- i. Melaksanakan penertiban surat keterangan permohonan akte catatan sipil.
- j. Melaksanakan penertiban, legalisir permohonan dan penyediaan ijin gangguan HO In Gang, penutupan jalan, saluran air, limbah dan IMBB sesuai dengan kewenangnya (penyelianteknis, masuk pada masing-masingseksi yang membindangi).
- k. Melaksanakan penertiban perijinan gangguan (HO) pondokan, surat ijin penjelenggaraan pondokan dan PKS.
- l. Melaksanakan legislasi permohonan (perizinan keramaian, SKCH) perkereditan dan permohonan.
- m. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Distrik.

6. Pemberdayaan Seksi Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang Sumber Daya Manusia, perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup, Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 15, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas.

1. Kegiatan pertanian pertanian, perindustrian, perdagangan dan pembagian keuangan,

2. Pembinaan Masyarakat pendangan pelaku ekonomi dilingkunganpasar,
3. Transparansi dan pengandilan terhadap pendagang barang dan jasa Faslitasi penyehatan lingkungan.
4. Fasilitas penyehatan lingkungan.
5. Mengumpulkan mengelolah data dan infomasi,menginventaritasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta peyunjuk teknisyang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
8. Melaksanakan hubungan kerja koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan perimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah di Distrik.
10. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pejaluran gelandangan, pengemis dan penyandang masah sosial lain yang ada diwilayah distrik.
11. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, kesejahktraan sosial.
12. Memfasilisasi kegiatan kebersihan dan keindahan dilingkungan Distrik.
13. Melaksanakan pembinaan pemondokan
14. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi,
15. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Distrik.

7. Seksi Pembangunan Dan Perekonomian

Seksi pembangunan dan perekonomian mempunyai fungsi pengembangan perekonomian dan pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut fungsi pembangunan dan perekonomian mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan dan perekonomian.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menjiapkan bahan kebijakan, teknis pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan perkembangan dan perekonomian.
- d) Menjiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- e) Melaksanakan hubungan kerja koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Melaksanakan, pembahasan musrembang Distrik terhadap rencana pembangunan dalam wilayah Distrik.
- g) Melaksanakan, monitori dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- h) Melaksanakan penyelian, pembangunan pemukiman di wilayah Distrik.
- i) Melaksanakan penyediaan data/bahan dan pembinaan yang berkaitan dengan permodalan, perindustrian perdagangan dan perkoperasian usaha ekonomi Desa/masyarakat (UEDSP), perdagangan kaki lima kelompok ekonomi produktif di Distrik.
- j) Melaksanakan penyelian teknis perisinan HO, In Gang IMB, SAL DAN SAH.
- k) Melaksanakan identifikasi lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Distrik.
- l) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan prioritas pemecahan masalah pencemaran di wilayah Distrik.

- m) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan daerah sungai (DAS),
- n) Menjiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana pelajanan umum.
- o) Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, parawisata, perekonomian dan lingkungan hidup.
- p) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- q) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Distrk.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program bidang kesejahteraan sosial, dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan keamanan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa.
- b. Fasilitasi Organisasi Sosial dan bantuan sosial.
- c. Fasilitasi pemberantasan penyakit menular dan perbaikan Gizi masyarakat.
- d. Fasilitasi Usaha Kesehatan Masyarakat dan keluarga berencana.
- e. Fasilitasi peran serta masyarakat
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik.

A. Keadaan Responden

Jumlah Pegawai Pemerintahan Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 39 orang, dapat melihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya untuk diketahui

keadaan dan jumlah pegawai yang ada dilihat dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat umur, dan masa kerja sebagai berikut :

1. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat :

Gambar 4.2
Keadaan Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Klmin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	28	71,79
2.	Perempuan	11	28,10
Jumlah		39	100 %

Sumber data: Kantor Distrik Jiginua 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diperoleh suatu gambaran bahwa Keadaan jumlah pegawai di Distri Jiginua 39 orang, jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang atau 71,79% dan jenis kelamin perempuan selebihnya 11 orang atau 28,10% .

2. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dikembang semakin tua berarti semakin dewasa atau mantang dalam menganbil keputusan.

Untuk mengetahui keadaan pegawai di Distrik Jiginua berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 4.3
Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1.	20-30	4	10,26
2.	31-40	19	48,71
3.	41-50	14	35,91
4.	51	2	5,12
Jumlah		39	100

Sumber data : Kantor Distrik Jiginua 2020.

Komposisi umur pegawai konsentrasi pada umur antara 20-30 sebanyak 4 atau (10,26%) 31-40 sebanyak 19 atau (48,71), 41-50 sebanyak 14 atau (35,91%) dan 51 sebanyak 2 atau (5,12%).

Keadaan pegawai distrik Jiginua berdasarkan tingkat pendidikan karena faktor pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang dan bahkan sampai kepada seseorang mengenalisa dan menyelesaikan setiap persoalan yang di hadapinya untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	0	00,00
2.	SLTP	3	7,69
3.	SMA	33	84,61
4.	D 3 / D2/ D1	1	2,56
5	S I	2	5,12
Jumlah		39	100%

Sumber data: Kantor Distrik Jiginua 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, pendidikan formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang dimulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai yang terbanyak adalah SMA sebanyak 33 orang 84,61%.

c. Analisa Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya (*Studi Kasus di Kampung Tepogi* terbagi dalam tiga indikator yaitu: partisipasi, Daya Tanggap, Pengawasan, Efisien, Transparansi.

a. partisipasi

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator partisipasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tanggapan responden terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Pembangunan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	13	52
Baik	3	11	33
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	4	4
Jumlah		39	111

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan, dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 13 responden, kategori baik sebanyak 11 responden, kategori tidak baik sebanyak 11 responden dan sangat tidak baik sebanyak 4 responden dengan jumlah skor adalah 111 dengan predikat baik

Tabel 4.2
Tanggapan responden terhadap Pemerintahan Kampung Sering Melibatkan Masyarakat Dalam Membantu Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	13	52
Baik	3	12	36
Tidak Baik	2	10	20
Sangat Tidak Baik	1	4	4
Jumlah		39	112

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Pemerintahan Kampung Sering Melibatkan Masyarakat Dalam Membantu Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 13 responden, kategori baik sebanyak 12 responden, kategori tidak baik sebanyak 10 responden dan sangat tidak baik sebanyak 4 responden dengan jumlah skor adalah 112 dengan predikat baik.

Tabel 4.3

Tanggapan responden terhadap Masyarakat sangatlah berperan penting dalam struktur pemerintahan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	11	44
Baik	3	12	36
Tidak Baik	2	7	14
Sangat Tidak Baik	1	9	9
Jumlah		39	103

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Masyarakat sangatlah berperan penting dalam struktur pemerintahan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 11 responden, kategori baik sebanyak 12 responden, kategori tidak baik sebanyak 7 responden dan sangat tidak baik sebanyak 9 responden dengan jumlah skor adalah 103 dengan predikat baik.

Tanggapan responden terhadap Masyarakat sangat berpartisipasi dalam keterlibatan dalam pemerintahan kampung distrik jiginuk

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	17	68
Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	8	16
Sangat Tidak Baik	1	5	5
Jumlah		39	116

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Masyarakat sangat berpartisipasi dalam keterlibatan dalam pemerintahan kampung distrik jiginuk. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 17 responden, kategori baik sebanyak 9 responden, kategori tidak baik sebanyak 8 responden dan sangat tidak baik sebanyak 5 responden dengan jumlah skor adalah 116 dengan predikat baik.

b. Daya tanggap

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator daya tanggap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Tanggapan responden terhadap Respon penyelenggara pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	15	60
Baik	3	16	48
Tidak Baik	2	5	10
Sangat Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		39	121

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Respon penyelenggara pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 15

responden, kategori baik sebanyak 16 responden, kategori tidak baik sebanyak 5 responden dan sangat tidak baik sebanyak 3 responden dengan jumlah skor adalah 121 dengan predikat sangat baik.

Tabel 4.6

Tanggapan responden terhadap Daya tanggap pemerintahan kampung dalam mengujudkan pemerintahan yang baik

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	13	52
Baik	3	14	42
Tidak Baik	2	7	14
Sangat Tidak Baik	1	6	6
Jumlah		39	114

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Daya tanggap pemerintahan kampung dalam mengujudkan pemerintahan yang baik. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 13 responden, kategori baik sebanyak 14 responden, kategori tidak baik sebanyak 7 responden dan sangat tidak baik sebanyak 6 responden dengan jumlah skor adalah 114 dengan predikat baik.

Tabel 4.7

Tanggapan responden terhadap pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiatif - inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	14	56
Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	5	5
Jumlah		39	110

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiatif - inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. dikampung tepogi yang menjawab

kategori sangat baik sebanyak 14 responden, kategori baik sebanyak 9 responden, kategori tidak baik sebanyak 11 responden dan sangat tidak baik sebanyak 5 responden dengan jumlah skor adalah 110 dengan predikat baik.

Tabel 4.8

Tanggapan responden terhadap Kepekaan masyarakat dalam taa kelola penyelenggaraan pemerintahan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	9	36
Baik	3	13	39
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	8	8
Jumlah		39	101

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Kepekaan masyarakat dalam taa kelola penyelenggaraan pemerintahan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 9 responden, kategori baik sebanyak 13 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 8 responden dengan jumlah skor adalah 101 dengan predikat baik.

c. Pengawasan

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator Pengawasan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Tanggapan responden terhadap Bagaimana bentuk Pengawasansosial pembangunan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	11	44
Baik	3	12	36
Tidak Baik	2	14	28
Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		39	110

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana bentuk Pengawasansosial pembangunan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 11 responden, kategori baik sebanyak 12 responden, kategori tidak baik sebanyak 14 responden dan sangat tidak baik sebanyak 2 responden dengan jumlah skor adalah 110 dengan predikat baik.

Tabel 4.10
Tanggapan responden terhadap Pengawasanyang dilakukan pemerintahan kampung distrik jiginua

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	18	72
Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		39	120

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasanyang dilakukan pemerintahan kampung distrik jiginua. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 18 responden, kategori baik sebanyak 9 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 3 responden dengan jumlah skor adalah 120 dengan predikat sangat baik.

Tabel 4.11

Tanggapan responden terhadap Bagaimana Pengawasananggaran pemerintahan kampung di distrik jiginua

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	15	60
Baik	3	11	33
Tidak Baik	2	10	20
Sangat Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		39	116

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana Pengawasananggaran pemerintahan kampung di distrik jiginua. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 15 responden, kategori baik sebanyak 11 responden, kategori tidak baik sebanyak 10 responden dan sangat tidak baik sebanyak 3 responden dengan jumlah skor adalah 116 dengan predikat baik.

Tabel 4.12

Tanggapan responden terhadap Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	15	60
Baik	3	10	30
Tidak Baik	2	13	26
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		39	117

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 15 responden, kategori baik sebanyak 10 responden, kategori tidak baik sebanyak 13 responden dan sangat tidak baik sebanyak 1 responden dengan jumlah skor adalah 117 dengan predikat baik.

d. Efisiensi

Tabel 4.13
Tanggapan responden terhadap Bagaimana sumber daya yang dimiliki di distrik jiginua

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	13	52
Baik	3	10	30
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	5	5
Jumlah		39	109

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana sumber daya yang dimiliki di distrik jiginua dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 13 responden, kategori baik sebanyak 10 responden, kategori tidak baik sebanyak 11 responden dan sangat tidak baik sebanyak 5 responden dengan jumlah skor adalah 109 dengan predikat baik.

Tabel 4.14
Tanggapan responden terhadap Bagaimana tingkat keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	15	60
Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	6	6
Jumlah		39	111

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana tingkat keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 15 responden, kategori baik sebanyak 9 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 6 responden dengan jumlah skor adalah 111 dengan predikat baik.

Tabel 4.15
Tanggapan responden terhadap Bagaimana peningkatan kerja dalam mengoptimalkan waktu kerja

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	12	48
Baik	3	10	30
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	8	8
Jumlah		39	104

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana peningkatan kerja dalam mengoptimalkan waktu kerja dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 12 responden, kategori baik sebanyak 10 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 8 responden dengan jumlah skor adalah 104 dengan predikat baik.

Tabel 4.16

Tanggapan responden terhadap Bagaimana Efisiensi yang diberikan kepada masyarakat

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	15	60
Baik	3	11	33
Tidak Baik	2	10	20
Sangat Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		39	116

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana Efisiensi yang diberikan kepada masyarakat dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 15 responden, kategori baik sebanyak 11 responden, kategori tidak baik sebanyak 10 responden dan sangat tidak baik sebanyak 3 responden dengan jumlah skor adalah 116 dengan predikat baik..

e. Transparansi

Tabel 4.17

Tanggapan responden terhadap Bagaimana Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	10	40
Baik	3	12	36
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	8	8
Jumlah		39	102

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 10 responden, kategori baik sebanyak 12 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 8 responden dengan jumlah skor adalah 102 dengan predikat baik.

Tabel 4.18
**Tanggapan responden terhadap Bagaimana wujud
 pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang tata
 kelola**

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	17	68
Baik	3	8	24
Tidak Baik	2	9	18
Sangat Tidak Baik	1	5	5
Jumlah		39	115

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang tata kelola. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 17 responden, kategori baik sebanyak 8 responden, kategori tidak baik sebanyak 9 responden dan sangat tidak baik sebanyak 5 responden dengan jumlah skor adalah 115 dengan predikat baik.

Tabel 4.19
**Tanggapan responden terhadap Bagaimana keterbukaan
 pemerintah dalam memberikan informasi**

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	14	56
Baik	3	12	36
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		39	116

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi. dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 14 responden, kategori baik sebanyak 12 responden, kategori

tidak baik sebanyak 11 responden dan sangat tidak baik sebanyak 2 responden dengan jumlah skor adalah 103 dengan predikat baik.

Tabel 4.20
Tanggapan responden terhadap Bagaimana keterbukaan dalam membuat kebijakan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	11	44
Baik	3	13	39
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	4	4
Jumlah		39	109

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap Bagaimana keterbukaan dalam membuat kebijakan dikampung tepogi yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 11 responden, kategori baik sebanyak 13 responden, kategori tidak baik sebanyak 11 responden dan sangat tidak baik sebanyak 4 responden dengan jumlah skor adalah 109 dengan predikat baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Partisipasi

Partisipasi merupakan sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Tabel 4.17
Rata-rata skor
Indikator Partisipasi

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan	111	Baik
2	Pemerintahan kampung sering melibatkan masyarakat dalam membantu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	112	Baik
3	Masyarakat sangatlah berperan penting dalam struktur pemerintahan	103	Baik
4	Masyarakat sangat berpartisipasi dalam keterlibatan dalam pemerintahan kampung distrik jiginuk	116	Baik
Rata-rata		110	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.17 hasil analisis tanggapan responden mengenai partisipasi menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat baik, artinya masyarakat sangat berpartisipasi setiap proses pembangunan

2. Indikator Daya Tanggap

Daya Tanggap merupakan Sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat.

Tabel 4.18
Rata-rata skor
Indikator Daya Tanggap

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Respon penyelenggara pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat	121	Sangat Baik
2	Daya tanggap pemerintahan kampung dalam mengujudkan pemerintahan yang baik	114	Baik
3	pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiatif – inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas	110	Baik
4	Kepekaan masyarakat dalam taa kelola penyelenggaraan pemerintahan	101	Baik
Rata-rata		117	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 hasil analisis tanggapan responden mengenai pengoorganisasian menunjukan rata-rata skor 111 dengan predikat baik, artinya kepekaan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah sudah memahami secara keseluruhan.

3. Indikator Pengawasan

Pengawasan merupakan Sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 4.19
Rata-rata skor
Indikator Pengawasan

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Bagaimana bentuk pengawasan sosial pembangunan	110	Baik
2	Pengawasan yang dilakukan pemerintahan kampung distrik jiginua	120	Sangat Baik
3	Bagaimana pengawasan anggaran pemerintahan kampung di distrik jiginua	116	Baik
4	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung	117	Baik
Rata-rata		115	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai pelaksanaan menunjukkan rata-rata skor 115 dengan predikat baik, artinya dimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kampung distrik sudah cukup baik sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan baik.

4. Indikator Efisien

Efisien merupakan Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Tabel 4.20
**Rata-rata skor
 Indikator Efisien**

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Bagaimana sumber daya yang dimiliki di distrik jiginua	109	Baik
2	Bagaimana tingkat keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan	111	Baik
3	Bagaimana peningkatan kerja dalam mengoptimalkan waktu kerja	104	Baik
4	Bagaimana efisiensi yang diberikan kepada masyarakat	116	Baik
Rata-rata		110	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai pelaksanaan menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat baik, peningkatan kerja yang dilakukan sudah optimal dalam mengerjakan setiap pekerjaan terutama pada penyelenggaraan pemerintahan di distrik jiginua

5. Indikator Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Tabel 4.20
Rata-rata skor
Indikator Transparansi

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Bagaimana Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan	102	Baik
2	Bagaimana wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang tata kelola	115	Baik
3	Bagaimana keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi	116	Baik
4	Bagaimana keterbukaan dalam membuat kebijakan	109	Baik
Rata-rata		110	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai pelaksanaan menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat baik, keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan ataupun kegiatan menyangkut penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 4.21
Rata-rata skor
Variabel Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1	Partisipasi	110	Baik
2	Daya Tanggap	111	Baik
3	Pengawasan	115	Baik
4	Efisien	110	Baik
5	Transparansi	110	Baik
Rata-rata		111	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.21 hasil analisis tanggapan responden mengenai hubungan kerja pegawai menunjukkan rata-rata skor 111 dengan predikat baik artinya, hubungan kerja pegawai yang dijalin hingga sekarang dimana Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya dengan menggunakan dimensi kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, kerjasama dengan orang lain dalam bekerja, dan kemampuan diri merupakan cara yang dapat digunakan untuk dapat mendeskripsikan Tata Kelola Pemerintah Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya, Dengan adanya dimensi yang digunakan maka akan dapat dianalisis tata kelola pemerintahan kampung sebagai berikut:

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya *good governance* dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Pemerintah Distrik Jiginua memberikan informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat nya dengan mengadakan rapat tahunan yang diselenggarakan pada awal tahun dan akhir tahun rapat itu bisa disebut dengan *Musrenbangdes*, Rapat tersebut berangotakan Kepala distrik Jiginua berserta Perangkat Desa, Distrik Jiginua serta Tokoh-tokoh masyarakat Kampung, rapat tersebut berisikan tentang apa yang menjadi progam prioritas desa untuk satu tahun kedepannya. Pemerintahan distrik Jiginua juga memberikan informasi yang berhubungan tentang desa kepada masyarakat dengan bebas, artinya memberi kebebasan kepada masyarakat distrik untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan distrik dengan cara datang langsung ke distrik.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya (*Studi Kasus di Kampung Tepogi*). dapat disimpulkan dibawah ini :

- 1) Partisipasi dimana analisis tanggapan responden mengenai partisipasi menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik.
- 2) Daya Tanggap analisis tanggapan responden mengenai daya tanggap menunjukkan rata-rata skor 111 dengan predikat Baik.
- 3) Pengawasan analisis tanggapan responden mengenai pengawasan menunjukkan rata-rata skor 115 dengan predikat Baik,
- 4) Efisien analisis tanggapan responden mengenai Efisien menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik,
- 5) Transparansi analisis tanggapan responden mengenai Transparansi menunjukkan rata-rata skor 110 dengan predikat Baik,
- 6) tata kelola Penyelenggaran Pemerintah analisis tanggapan responden mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintah menunjukkan rata-rata skor 111 dengan predikat Baik,

B. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik, secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.

- 3) Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas terkhusus dikampung tepogi.
- 4) Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 5) Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Lampiran 1 :

A. IDENTITAS

1. Nomor Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan :

B. PETUNJUK

Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom pada kategori skor/bobot pilihan jawaban yang sesuai menurut anda. Adapun kategori yang digunakan adalah :

- e. SB : Sangat Baik
- f. B : Baik
- g. TB : Tidak Baik
- h. STB : Sangat Tidak Baik

1. Partisipasi

NO	Pernyataan	SB	B	TB	STB
1	Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan?				
2	Pemerintahan kampung sering melibatkan masyarakat dalam membantu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan?				
3	Masyarakat sangatlah berperan penting dalam struktur pemerintahan?				
4	Masyarakat sangat berpartisipasi dalam keterlibatan dalam pemerintahan kampung distrik jiginuk?				

2. Daya Tanggap

NO	Pernyataan	SB	B	TB	STB
1	Respon penyelenggara pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat?				
2	Daya tanggap pemerintahan kampung dalam mengujudkan pemerintahan yang baik?				
3	pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiatif – inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas?				
4	Kepekaan masyarakat dalam taa kelola penyelenggaraan pemerintahan?				

3. Pengawasan

NO	Pernyataan	SB	B	TB	STB
1	Bagaimana bentuk pengawasan sosial pembangunan?				
2	Pengawasan yang dilakukan pemerintahan kampung distrik jiginua?				
3	Bagaimana pengawasan anggaran pemerintahan kampung di distrik jiginua?				
4	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung ?				

4. Efisiensi

NO	Pernyataan	SB	B	TB	STB
1	Bagaimana sumber daya yang dimiliki di distrik jiginua?				
2	Bagaimana tingkat keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan?				
3	Bagaimana peningkatan kerja dalam mengoptimalkan waktu kerja?				
4	Bagaimana efisiensi yang diberikan kepada masyarakat?				

5. Transparansi

NO	Pernyataan	SB	B	TB	STB
1.	Bagaimana Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan?				
2.	Bagaimana wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat tentang tata kelola?				
3.	Bagaimana keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi?				
4.	Bagaimana keterbukaan dalam membuat kebijakan?				

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika , Jakarta. hlm 45
- Amirullah, M. A., Ulum, I. & Prasetyo, A. (2016).
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2015). *Public Sector Accounting*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyani,H.& Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja:Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2),
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang tahun 2013 Tentang pemerintahan desa.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan AnggaranMPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 27-46.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Wijaya, A. H. C. & Akbar, R. 2013. The Influence of Information, Organizational Objective and Targets, and External Pressure toward The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28, 62-83.

B. Website

Yuliana dwi ambarwati, 2013. Tata kelola penyelenggara pemerintahan Desa menurut PP no 72 tahun 2005 studi kasus di desa tarubasan kabupaten karanganyar kabupaten klaten jurnal Vol.1, No.1 (2013).

Suhardi ,2016, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) *jurnal* Vol 4, No 3.

Rudy Suryanto, 2018 praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari desa percontohan Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 1 Hal 1-16.

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian

DATA HASIL PENELITIAN
(Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya
(Studi Kasus Di Kampung Tepogi))

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan															
	partisipasi															
	1				2				3				4			
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB
1	√					√				√			√			
2			√				√					√				√
3				√	√							√		√		
4	√						√			√			√			
5			√			√			√							√
6	√				√							√		√		
7			√				√					√				√
8	√					√			√				√			
9			√					√				√			√	
10	√				√						√			√		
11		√				√				√			√			
12	√				√				√							√
13		√						√				√				√
14	√					√					√				√	
15				√	√					√				√		
16		√					√		√				√			
17	√				√						√					

18			√		√				√				√			
19		√				√				√					√	
20		√			√					√			√			
21			√				√		√					√		
22	√					√				√			√			
23	√				√					√					√	
24		√					√		√				√			
25			√			√				√				√		
26		√			√						√	√				
27	√						√			√					√	
28			√			√			√				√			
29		√			√					√				√		
30			√				√				√	√				
31		√				√			√						√	
32	√				√					√			√			
33				√				√			√				√	
34		√					√			√			√			
35	√							√	√				√			
36			√				√					√	√			
37				√		√					√				√	
38		√				√				√				√		
39			√		√				√				√			
Total	13	11	11	4	13	12	10	4	11	12	7	9	17	9	8	5

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan															
	Daya Tanggap															
	1				2				3				4			
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB
1		√			√							√	√			
2	√					√					√				√	
3		√					√		√							√
4	√							√				√				√
5			√			√				√					√	
6		√			√				√						√	
7	√						√				√		√			
8			√		√					√						√
9		√						√	√					√		
10	√					√					√		√			
11		√			√					√				√		
12	√					√			√						√	
13		√					√				√			√		
14	√				√				√							√
15			√			√					√				√	
16		√					√		√					√		
17	√				√							√	√			
18			√			√					√				√	
19		√					√		√					√		
20	√							√				√				√
21		√				√					√			√		
22	√				√				√				√			

23		√			√				√					√		
24	√					√			√							√
25				√	√					√				√		
26		√				√					√		√			
27	√						√		√						√	
28		√			√					√				√		
29				√		√						√			√	
30		√					√			√				√		
31	√					√			√				√			
32			√		√						√			√		
33	√							√		√						√
34		√				√			√					√		
35				√	√						√		√			
36		√				√				√					√	
37	√							√			√					√
38		√				√				√				√		
39	√				√				√				√			
Total	15	16	5	3	13	14	7	6	14	9	11	5	9	13	9	8

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan															
	Pengawasan															
	1				2				3				4			
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB
1				√	√							√			√	
2	√						√		√							√
3				√	√						√				√	
4			√					√	√						√	
5	√						√						√			
6			√		√						√				√	
7			√				√		√				√			
8			√		√						√				√	
9	√						√				√		√			
10			√		√				√						√	
11			√				√				√		√			
12	√				√						√			√		
13		√					√		√				√			
14	√				√					√					√	
15			√			√			√						√	
16		√						√		√			√			
17	√				√						√			√		
18		√				√			√				√			
19			√		√					√					√	
20		√			√							√		√		
21	√						√		√				√			
22			√		√						√			√		

23		√				√				√			√			
24	√				√				√					√		
25		√						√	√				√			
26		√				√				√				√		
27			√		√				√				√			
28		√				√					√				√	
29			√		√					√				√		
30	√						√		√				√			
31		√				√				√				√		
32			√		√						√		√			
33	√					√				√					√	
34		√			√				√						√	
35	√					√				√			√			
36			√		√							√		√		
37		√					√			√					√	
38			√			√				√				√		
39		√			√				√				√			
Total	11	12	14	2	18	9	9	3	15	11	10	3	15	10	13	1

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan															
	Efisiensi															
	1				2				3				4			
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB
1	√				√				√					√		
2				√			√			√			√			
3		√			√						√			√		
4	√						√			√			√			
5				√				√				√				√
6				√			√				√			√		
7			√		√					√			√			
8	√						√				√				√	
9			√					√			√				√	
10		√			√					√				√		
11			√				√					√	√			
12		√						√			√				√	
13	√				√				√					√		
14			√					√		√					√	
15		√					√		√				√			
16	√							√		√				√		
17			√		√							√	√			
18			√			√			√						√	
19		√			√						√		√			
20	√						√			√						√
21			√			√			√				√	√		
22		√					√					√		√		

23	√					√				√					√	
24				√	√				√				√			
25		√			√				√				√			
26	√					√						√				√
27			√			√			√						√	
28		√			√						√		√			
29			√			√				√				√		
30		√			√				√						√	
31	√				√						√		√			
32				√		√						√		√		
33			√		√				√				√			
34	√						√					√		√		
35	√					√					√				√	
36			√		√				√				√			
37		√						√				√		√		
38	√					√				√					√	
39	√				√				√				√			
Total	13	10	11	5	15	9	9	6	12	10	9	8	15	11	10	3

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan															
	Transparansi															
	1				2				3				4			
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB
1			√		√				√				√			
2		√						√			√				√	
3				√	√						√					√
4		√						√				√			√	
5		√						√			√		√			
6				√	√				√							√
7				√			√					√			√	
8		√					√				√			√		
9				√	√				√				√			
10		√			√					√					√	
11	√						√		√						√	
12				√	√						√		√			
13	√					√				√					√	
14				√	√				√					√		
15			√				√				√		√			
16	√					√			√						√	
17			√		√					√				√		
18		√					√		√				√			
19		√			√					√				√		
20	√						√		√						√	
21			√		√					√				√		
22			√			√			√				√			

23	√				√						√		√			
24				√				√			√		√			
25		√			√					√					√	
26	√				√					√			√			
27			√			√			√				√			
28		√					√			√			√			
29	√					√					√			√		
30				√	√					√			√			
31			√					√	√				√			
32		√				√					√		√			
33	√				√					√			√			
34			√				√		√					√		
35	√					√					√			√		
36		√			√					√			√			
37			√				√		√				√			
38		√				√				√						
39	√				√				√				√			
Total	10	12	9	8	17	8	9	5	14	12	11	2	11	13	11	4



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM)
YAPIS WAMENA**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Hom-Hom, Wamena Telp. (0969) 31751 Fax. (0969) 34053 Kotak Pos 148
E-mail : stisipwamena@gmail.com Website : stisipaiwamena.ac.id

Nomor : 4.37/024/143030/II/2020
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Pengantar Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth
**Kepala Distrik Jiginua
Kabupaten Lanny Jaya**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana dan pengambilan data untuk Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas nama:

Nama Lengkap : **Idefri Kogoya**
NIM : 2014 10 136
Semester : X (Sepuluh)
Bidang Kajian : Ilmu Pemerintahan
Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : **Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Pada Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya (studi kasus di Kampung Tepogi)**
Lokasi Penelitian : Kelapa Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

Untuk keperluan tersebut di atas, maka mohon kiranya dapat diberi ijin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul Skripsi dimaksud di atas. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wamena, 06 Maret 2020
Kepala LPPM,

* **TIOMY B. ADL. SE., M.Si.**
NIDN. 1411057501

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, di Wamena
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DISTRIK JIGINUA
KAMPUNG TEPOGI**

SURAT PENGANTAR

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala kampung Tepogi menerapkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : IDEFRI KOGOYA
Nim : 2014 10 136
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Semester : 10 (Sepuluh)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Berdasarkan surat pengantar bahwa mahasiswa tersebut di atas benar – benar telah mengikuti penelitian di tempat yang sudah di tentukan Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya, maka saya memberikan surat pengantar dari Kampung Tepogi Distrik Jiginua Kabupaten Lanny Jaya.

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tepogi, 27 Februari 2020

Kepala Kampung



BIODATA PENULIS :



Idefri Kogoya, Dilahirkan di Tiom pada tanggal 03 Agustus 1994, dari pasangan Bapak Mupis Kogoya dan Ibu. Delina Jigibalom, anak ke pertama dari dua bersaudara. Tamat Inpres Tiom pada tahun 2006, tamat SMP YPPGI Tiom Lulus Tahun 2009, tamat SMA N 1 Tiom tahun 2012. Pada tahun 2014 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena tahun akademik 2014/2015. Dan kini telah berubah kelembagaan menjadi Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Pada Tahun 2020.

**DOKUMENTASI DIKANTOR DISTRIK JIGINUA KABUPATEN
LANNY JAYA**





APARAT KAMPUNG PADA SAAT PENGISIAN

